













4. *Rezim Stewardship* menggunakan koalisi kelompok, partisipasi warga, serta hukum negara sebagai basis kelembagaan mereka dan para aktor yang terlibat adalah kelompok bisnis dan kelompok populis fiskal serta broker walikota.
5. Pada rezim progresif (*progressive rezimes*) mereka menggunakan basis kelembagaan sebagai koalisi pemilihan minoritas, kebijakan “*affirmative-action*”, distrik dengan anggota tunggal, pemerintah yang berdekatan, seperti hukum negara. Pada rezim ini para aktor yang berinteraksi dengan kelompok bisnis adalah kelompok *social justice mayors* dan kelompok aktivis.
6. Dan terakhir, yaitu rezim sisi permintaan (*demand-side rezimes*) yang basis kelembagaan utamanya adalah organisasi (*neighborhood organizations, single-member district, and state laws*). Para Aktor yang terlibat adalah kelompok *caretaker mayors*, birokrat yang anti kemapanan, serta kelompok post-material.

Dengan memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam memahami berbagai Aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, maka konsep dan konteks aktor adalah sangat terkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang akan dianalisis. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (*the official policy makers*) dan yang lain adalah kelompok di luar birokrasi (*un-official policy makers*). Anderson. Demikian pula pandangan Winarno bahwa kelompok yang terlibat dalam proses























1. *Decisional*, interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat untuk memperjuangkan kepentingannya atau dalam konteks kebijakan adalah untuk menetapkan pilihan akhir kebijakan. Interaksi ini juga dapat terjadi karena adanya kelompok kepentingan seperti bisnis yang secara langsung memberikan dukungan kepada pihak atau kelompok tertentu seperti pada saat pemilihan umum atau kampanye.
2. *Anticipated reaction*, interaksi yang bersifat langsung namun yang terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya pada situasi tertentu.
3. *Nondecision making*, interaksi yang diidentifikasi adanya kelompok yang kuat atau mayoritas berupaya mempengaruhi kebijakan. Interaksi tipe ini juga dapat melibatkan pihak ke tiga atau eksternal untuk mendukung salah satu aktor kebijakan. Pengaruh eksternal ini menjadi bagian dari kekuasaan dan kepentingan elit.
4. *Systemic*, interaksi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh system seperti sistem politik, ekonomi, sosial. Hal ini diidentifikasi melalui perilaku elit/ pejabat yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Dalam tipe interaksi ini penggunaan kekuasaan dilakukan oleh tiga kelompok atau aktor yang menempatkan pejabat public pada posisi tengah. Interaksi tidak langsung ditandai terjadinya interaksi antara kelompok kepentingan yang berusaha untuk









